

NOTULEN RAPAT

- Acara Rapat : Rapat Koordinasi Validasi Data dan Dokumen Pelaporan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 melalui Aplikasi SISMONTEPRA.
- Hari, Tgl, Pukul : Senin, 22 Juli 2019, 08.00 WIB s.d. selesai.
- Pimpinan Rapat : Karo Adpemda Setda Provinsi Banten
selaku Pejabat Penghubung TEPRA Provinsi Banten.
- Tempat : Ruang Rapat Biro Adpemda Setda Prov. Banten.
- Peserta : 1. Admin TEPRA Perangkat Daerah Provinsi Banten;
2. Pejabat Penghubung TEPRA Kab/Kota Se-Banten.
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TEPRA, Gubernur sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya:

1. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah;
2. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA;
3. menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA;
4. menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan
5. melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TEPRA.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1939/SJ, Tanggal 17 April 2013, Hal: Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep), dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 903.05/Kep.43-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2019, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Progres Pelaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Se-Banten kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 melalui Aplikasi SISMONTEPRA dengan mengundang:

1. Pejabat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Narasumber;
2. Admin TEPRA Perangkat Daerah Provinsi Banten, dan Pejabat Penghubung TEPRA Kabupaten/Kota Se-Banten sebagai peserta.

B. PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI

Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten. Beberapa hal yang disampaikan, diantaranya:

1. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Sismontepra agar update dan valid, karena kemungkinan akan digunakan pada Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se-Indonesia pada Tanggal 26-Juli-2019;
2. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya proses review HPS untuk pekerjaan konstruksi oleh Satgas BPKP RI Perwakilan Banten. Hal ini sebagai prinsip kehati-hatian sebelum proses lelang/tender dan pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten.
3. Aplikasi SIMRAL dengan Aplikasi SIRUP penting untuk diintegrasikan guna otomatis dan mempercepat pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) atas paket-paket pekerjaan setelah proses penyusunan Rancangan APBD disetujui.

Narasumber dari Dirjen Bina Keuda Kemendagri menyampaikan materi paparannya dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Amanat pembentukan TEPRAs Pusat dan Daerah, Bentuk Koordinasi TEPRAs, dan Tugas-tugas TEPRAs;
2. Realisasi belanja Provisi Banten Tahun Anggaran 2018 berdasarkan laporan kepada TEPRAs berada di atas rata-rata nasional atau diperingkat 20 dari 31 Provinsi di Indonesia;
3. Realisasi belanja Provisi Banten sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan laporan kepada TEPRAs berada di atas rata-rata nasional atau diperingkat 16 dari 28 Provinsi di Indonesia;
4. Realisasi belanja Kabupaten dan Kota Se-Banten sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan laporan kepada TEPRAs berada di bawah rata-rata nasional sebesar 40,2%.
5. Menginformasikan tahapan dan jadwal penyusunan APBD;
6. Mengingatkan pelaksanaan APBD yang rawan korupsi;
7. Menyampaikan isu-isu pokok pelaksanaan APBD menjadi tidak optimal;

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

NOTULIS

Dani Lukman Rinjani, SE
NIP. 19820705 200604 1 009

